

ABSTRACT

Timoti Leonard Kumolontang, 2024. **A LEGAL ANALYSIS OF NON-TARGET OBJECTS UNDER INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN THE RUSSIA-UKRAINE WAR**, Supervised by Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H. dan Ricky Th. Waworga S.H., M.H.

A war is an act involving the armed forces of one state against another, inevitably leads to violence, crimes against humanity, and the destruction of civilian objects. International humanitarian law, specifically the principle of distinction, stipulates that legitimate targets in warfare are military objectives, such as buildings used by the military. Targeting civilian objects is strictly prohibited, as further elaborated in Article 52 of the 1977 Additional Protocol I to the Geneva Conventions. This study aimed to analyze violations of international humanitarian law during the Russia-Ukraine war, focusing on the targeting of non-military objects. Furthermore, it examined the legal authority of the United Nations, through its General Assembly and Security Council, to resolve the conflict. This study employed a normative juridical method, utilizing legal literature and secondary data sources. The findings highlighted the legal framework governing the United Nations' authority, specifically the roles of the General Assembly and Security Council, in addressing the Russia-Ukraine war and enforcing international humanitarian law concerning the protection of non-target objects. This study concluded by proposing solutions to the issues raised. It argued for granting the UN General Assembly the authority to issue binding resolutions for all member states. Additionally, it emphasized the need for Russia, as a permanent member of the UN Security Council entrusted with maintaining international peace and security, to comply with and ratify the Rome Statute of the International Criminal Court.

Keywords: International Humanitarian Law, United Nations, Russia-Ukraine War

ABSTRAK

Timoti Leonard Kumolontang, 2024. **ANALISIS YURIDIS TERHADAP OBJEK NONTARGET MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM PERANG RUSIA DAN UKRAINA**, Dibimbing oleh: Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H. dan Ricky Th. Waworga S.H., M.H.

Perang adalah tindakan yang melibatkan kekuatan bersenjata suatu negara terhadap negara lainnya, perang mengakibatkan kekerasan, kejahatan terhadap kemanusiaan dan mengakibatkan kerusakan objek-objek sipil. Perang sebagaimana diatur dalam hukum humaniter internasional tentang prinsip pembedaan, menyatakan bahwa target yang sah adalah target militer seperti bangunan yang dipergunakan oleh militer. Karena itu, Objek sipil dilarang untuk dijadikan target selama perang dan lebih spesifik diatur dalam protokol tambahan I tahun 1977 Pasal 52 Ayat (1) dalam Konvensi Jenewa. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hukum humaniter internasional pada perang Rusia dengan Ukraina serta menganalisis kewenangan hukum perserikatan bangsa-bangsa melalui majelis umum dan dewan keamanan untuk menyelesaikan sengketa Rusia dengan Ukraina. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai cara menelitinya. Hasil penelitian ini yaitu pengaturan kewenangan hukum perserikatan bangsa-bangsa melalui majelis umum dan dewan keamanan dalam penyelesaian perang Rusia dan Ukraina dan penegakan hukum humaniter internasional terhadap perang Rusia dan Ukraina dalam hal objek nontarget. Penulis memberikan saran terhadap permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini yakni majelis umum perserikatan bangsa-bangsa harus diberikan kewenangan untuk membuat resolusi yang mengikat bagi semua negara-negara anggota perserikatan bangsa-bangsa dan Rusia sebagai subjek internasional untuk menaati serta meratifikasi mahkamah pidana internasional karena kedudukannya sebagai negara anggota permanen dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa yang memiliki tugas, tanggung jawab sebagai penjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perang Rusia dan Ukraina